



Analisis Pengelolaan Sistem Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Salsabila Nurul Hidayah¹

¹Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email : salsabila202012@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the management of the parking retribution system implemented by the Transportation Agency at the regency level, as well as to evaluate its contribution to increasing Local Own-Source Revenue (PAD). The method employed is descriptive qualitative research, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that despite digitalization efforts, such as the use of non-cash payment applications, the realization of parking retribution revenue has not yet met the established targets.

Keywords: *Transportation Agency, Effectiveness, Local Own-Source Revenue, Parking Retribution, Management System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sistem Retribusi Parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di tingkat Kabupaten, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya digitalisasi seperti penggunaan aplikasi pembayaran non-tunai, realisasi penerimaan retribusi parkir masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Kata kunci: *Dinas Perhubungan, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir, Sistem Pengelolaan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berideologi pancasila dimana terdiri dari banyaknya pulau-pulau serta merupakan salah satu daerah dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Tertulis pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, tentang pengertian otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan pungutan kepada masyarakat dalam pelaksanaannya. Ini berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu pelaksanaan negara,

yang menetapkan bahwa pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa sebagaimana telah diatur dalam undang-undang (Saputra, 2021).

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem retribusi parkir berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap efektivitas sistem pengelolaan retribusi parkir yang ada saat ini, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada suatu daerah, diperlukan adanya pelaksanaan dan pelayanan terhadap pembangunan secara efektif dan efisien sehingga pemerintah daerah mampu mengolah dan menilai sumber-sumber daya dalam pendapatan daerah.

KAJIAN TEORI

Pengertian Retribusi Parkir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produktivitas lingkungan dan manusia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi parkir yaitu menyelenggarakan pelayanan parkir tepi jalan umum sesuai dengan arahan pemerintah dan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan retribusi parkir melibatkan juru parkir sebagai pemungut retribusi parkir tepi jalan umum yang kemudian dibantu oleh kordinator lapangan kecamatan sebagai pengumpul setoran pendapatan retribusi parkir dari setiap juru parkir setiap kecamatan. Setelah pendapatan retribusi parkir terkumpul, kordinator lapangan kecamatan menyerahkan pendapatan parkir pada kordinator lapangan kabupaten, yang nantinya akan disetorkan kepada bendahara Dinas Perhubungan untuk di setorkan ke kas daerah. Dalam kenyataannya, Dinas Perhubungan belum memiliki aturan khusus yang mengatur pembagian hasil dengan para kordinator lapangan yang turut andil dalam penarikan atau pengumpulan pendapatan parkir dari juru parkir.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan sebagai bentuk perwujudan asas desentralisasi untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna mengurangi ketergantungan dalam mendapatkan dana subsidi dari pemerintah pusat (Umum, 2022).

Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir

E-retribusi merupakan pemungutan retribusi secara elektronik dan bisa langsung masuk ke rekening kas daerah, karena sebelum adanya e-retribusi pembayaran retribusi parkir membutuhkan waktu yang lama dan panjangnya jalur birokrasi pembayaran dari juru parkir hingga ke rekening kas daerah sehingga rawan akan kebocoran pendapatan parkir. Salah satu dampak positif dari diterapkannya e-retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal ke depan nantinya dapat mengurangi timbulnya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dengan adanya sistem yang baru pendapatan retribusi parkir bisa langsung masuk ke rekening kas daerah. Hal ini akan memudahkan dalam pemantauan dan menjamin transparansi pengelolaannya. Dalam hal pengelolaan retribusi parkir ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu Dinas perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana kebijakan, juru parkir dan kordinator lapangan sebagai pelaksana, Adapun salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam menangani permasalahan retribusi parkir yaitu melakukan inovasi dengan menerapkan e-retribusi parkir yang disebut dengan APIKEPOL (Alat Perlengkapan Parkir Elektronik Pembayaran Online). Apikepol merupakan inovasi dalam manajemen pengelolaan parkir tepi jalan dengan menggunakan pembayaran non tunai (Shelemo, 2023).

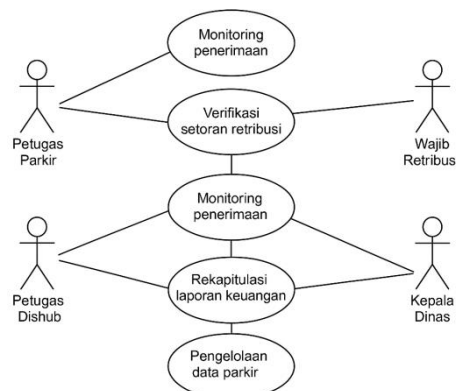
Agar lebih baik perlu adanya peningkatan untuk mengelola parkir di setiap titiknya. Ada beberapa perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan, yaitu:

1. Penetapan Target.
2. Pendataan dan penertiban titik lokasi parkir.
3. Survey titik lokasi parkir yang memiliki potensi agar berizin.
4. Mensosialisasikan e-retribusi parkir.

5. Menerapkan e-retribusi parkir.
6. Melakukan pengawasan titik parkir.
7. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Use Case

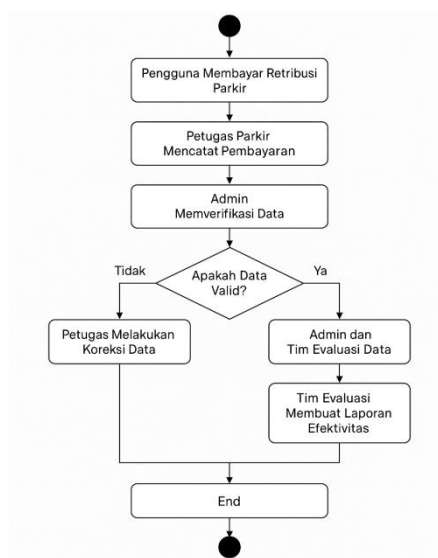
Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengguna (aktor) berinteraksi dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, bukan dari sisi teknis implementasinya.



Gambar 1. Use Case Diagram

Activity Diagram

Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses aktivitas dalam sistem, membantu analisis dan pengujian sistem secara sistematis, baik dari segi urutan maupun alur kontrol dan data.



Gambar 2. Activity Diagram

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus terhadap Pengelolaan Sistem Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Proses penelitian ini dilakukan melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku, kejadian, atau objek dalam konteks aslinya.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dengan memanfaatkan catatan-catatan atau dokumen yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau pihak lain dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

3. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penulis (Oktarina, 2010)

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian juga merupakan orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian dan dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
2. Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian yaitu: Data target, dan realisasi pendapatan retribusi parkir tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

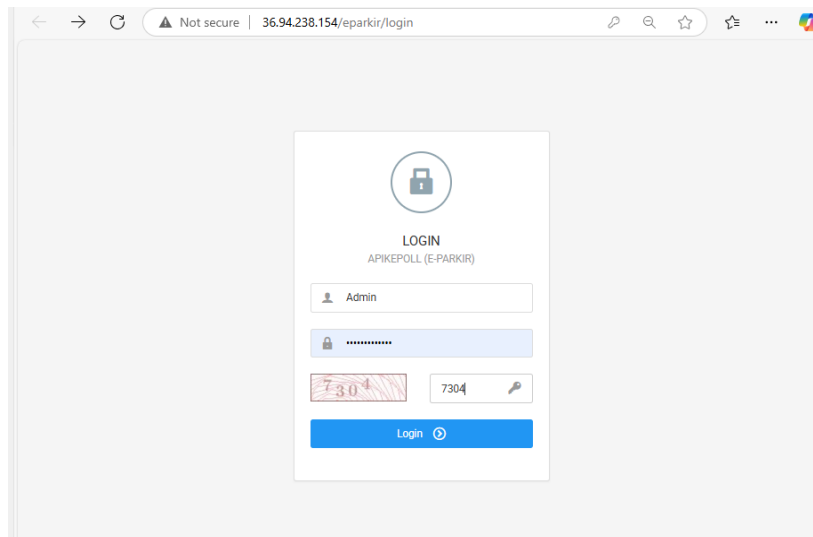
Penerapan Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir

Selama melaksanakan PKL di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, penulis ditempatkan pada bidang yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir. Kegiatan yang dilakukan adalah pengamatan terhadap sistem pemungutan retribusi sebagai admin dan menginput pembayaran retribusi parkir. Berdasarkan pengamatan selama PKL, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal telah menerapkan sistem pengelolaan retribusi parkir secara manual dan bertahap menuju digitalisasi. Petugas parkir ditugaskan pada titik-titik tertentu

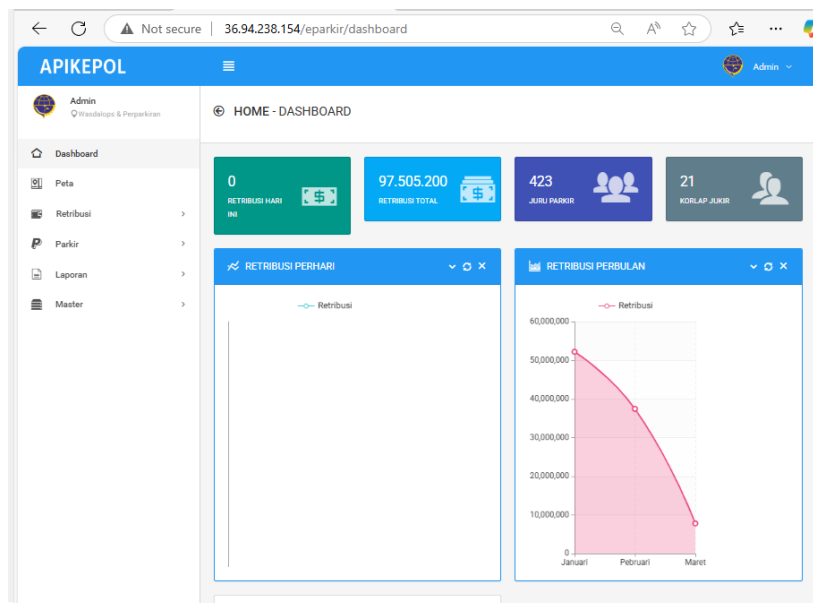
dan melakukan pemungutan secara langsung kepada pengguna jasa parkir. Berikut langkah-langkah dalam proses menginput pembayaran retribusi parkir menggunakan sistem APIKEPOL dan DUTA Laku Pandai Bank Jateng meliputi :

1. Login ke sistem APIKEPOL sebagai admin

Admin login menggunakan username dan password dan kode yang telah diberikan.



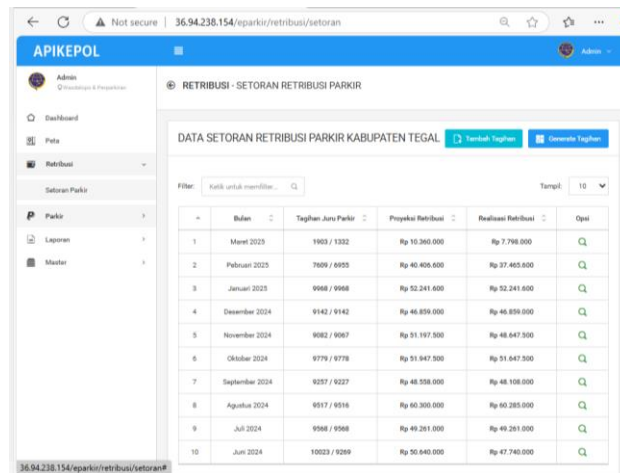
Gambar 3. Login



Gambar 4. Dashboard Admin

2. Halaman Setoran Parkir

Halaman ini berisi data setoran parkir berisi tanggal dan id untuk pembayaran retribusi.

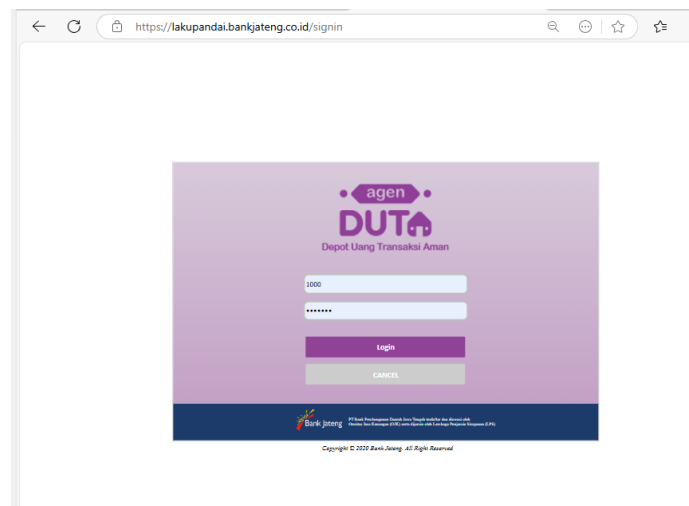


	Bulan	Tagihan Juru Parkir	Proyeksi Retribusi	Realisasi Retribusi	Opsi
1	Mei 2023	1903 / 1302	Rp 10.360.000	Rp 7.796.000	
2	Februari 2023	7609 / 6955	Rp 40.406.000	Rp 37.465.000	
3	Januari 2023	9968 / 9968	Rp 52.241.000	Rp 52.241.000	
4	Desember 2024	9142 / 9142	Rp 46.859.000	Rp 46.859.000	
5	November 2024	9082 / 9087	Rp 51.187.000	Rp 48.647.500	
6	Oktober 2024	9779 / 9778	Rp 51.947.000	Rp 51.647.500	
7	September 2024	9257 / 9227	Rp 48.558.000	Rp 48.108.000	
8	Agustus 2024	9517 / 9516	Rp 60.305.000	Rp 60.285.000	
9	Juli 2024	9568 / 9568	Rp 49.281.000	Rp 49.281.000	
10	Jun 2024	10023 / 9269	Rp 50.640.000	Rp 47.740.000	

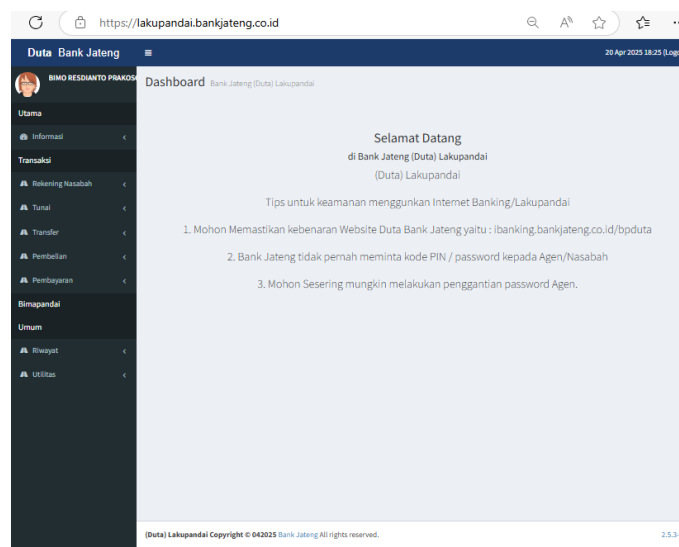
Gambar 5. Setoran Parkir

3. Login ke DUTA Laku Pandai Bank Jateng

Agen/Nasabah Login menggunakan username dan password yang telah diberikan.



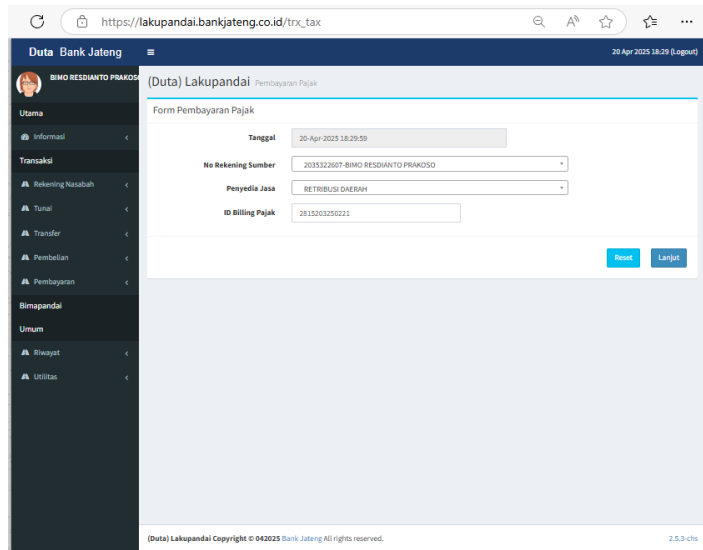
Gambar 6. Login DUTA



Gambar 7. Dashboard Agen

4. Agen menginput ID pembayaran retribusi parkir

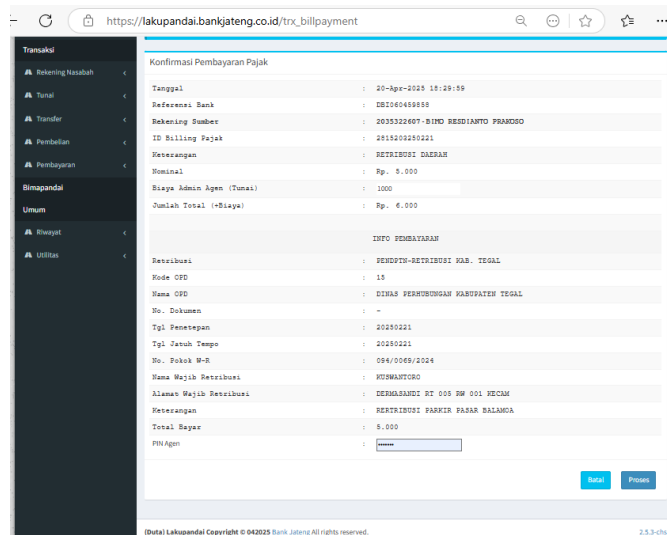
Agen menginput ID pembayaran retribusi parkir sesuai dengan yang ada pada data setoran parkir.



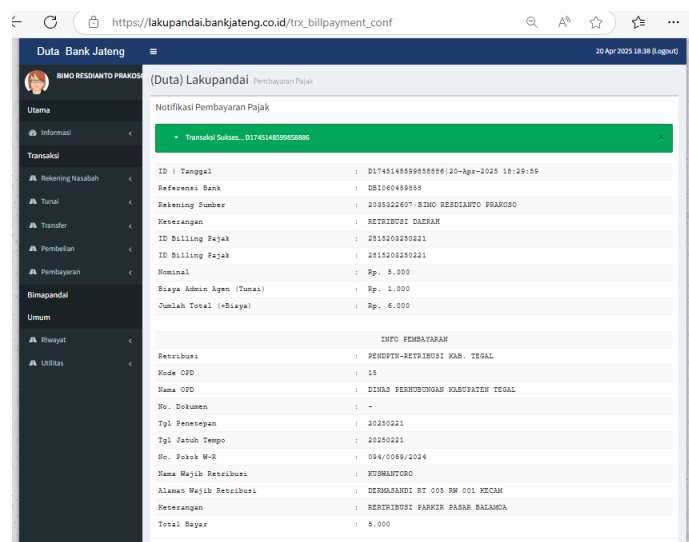
Gambar 8. Input ID Pembayaran

5. Halaman Konfirmasi pembayaran

Pada halaman konfirmasi pembayaran Agen/Nasabah diminta untuk masukan pin untuk mengonfirmasi pembayaran, jika sudah benar, tekan tombol proses.



Gambar 9. Masukkan PIN



Gambar 10. Transaksi Selesai

Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir

Efektivitas pemungutan retribusi parkir dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat selisih antara target dan realisasi, yang menunjukkan bahwa efektivitas belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya titik parkir yang dawasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan retribusi parkir selama 3 tahun terakhir sebagaimana telah digambarkan pada tabel dibawah ini :

Table 1 Capaian Indikator Persentase

Tahun	Target	Realisasi	(%) Realisasi
2022	1.329.000.000	651.793.000	49,04%
2023	1.461.900.000	701.829.000	48,01%
2024	1.329.000.000	622.180.000	46,82%

Dilihat dari tabel diatas dimana pada tahun 2022, persentase pencapaian retribusi parkir sebesar 49,04% dengan jumlah titik parkir 359, dan pada tahun 2023 persentase 48,01% dengan jumlah titik parkir 364 hal ini terjadi penurunan sebesar 1,77% dan penurunan jumlah titik parkir sebanyak 2 titik dikarenakan adanya potensi lokasi parkir yang sudah tidak ada dan juru parkir yang mengundurkan diri. Sedangkan di tahun 2024 persentase retribusi parkir sebesar 46,82% dengan jumlah titik parkir sebanyak 364 titik telah terjadi penurunan sebesar 7%. Angka ini jika dikalikan dengan 364 titik parkir yang ada di Kabupaten Tegal.

Pengelolaan sistem retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat menjadi lebih baik, melalui beberapa langkah strategis:

1. Perlu dilakukan peningkatan digitalisasi sistem pembayaran retribusi dengan memperluas penggunaan Aplikasi APIKEPOL dan metode pembayaran non tunai, sehingga transaksi lebih transparan dan akuntabel.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik petugas parkir maupun Duta Laku Pandai Bank Jateng, menjadi hal yang penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Selain itu, pengawasan rutin terhadap transaksi retribusi dan evaluasi kinerja secara berkala perlu diterapkan untuk mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Tidak kalah penting, dinas perhubungan perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi melalui jalur resmi, serta melakukan penyesuaian tarif dan zonasi parkir sesuai dengan potensi lokasi. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan retribusi parkir di kabupaten tegal diharapkan mampu mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah secara signifikan (Saputra, 2021).

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Optimalisasi pendapatan daerah adalah upaya strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) secara efektif dan efisien guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah. Pendekatan optimalisasi ini meliputi berbagai aspek mulai dari pengelolaan pajak daerah, retribusi, hingga inovasi sumber pendapatan baru yang sesuai dengan potensi daerah (Pemerintah Kabupaten Tegal, 2007).

Pemerintah Kabupaten Tegal mengoptimalkan PAD melalui:

1. Penguatan digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pendapatan daerah, termasuk implementasi sistem pembayaran elektronik terintegrasi.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan tata kelola pendapatan daerah.
3. Diversifikasi sumber PAD, dengan fokus pada peningkatan pendapatan retribusi daerah dan pajak daerah.
4. Kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank Jateng untuk mendukung percepatan digitalisasi dan optimalisasi penerimaan PAD.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Tegal belum optimal, yang terlihat dari masih adanya kebocoran penerimaan dan rendahnya kepatuhan juru parkir terhadap prosedur resmi, seperti penggunaan karcis dan setoran sesuai aturan. Minimnya pengawasan dan SDM menjadi kendala besar dalam sistem pengelolaan. Tanpa petunjuk teknis dan sistem kontrol yang efektif, Retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki kontribusi yang rendah terhadap PAD.

Digitalisasi sistem retribusi parkir, misalnya melalui penggunaan *e-ticketing* atau aplikasi parkir berbasis *QR code*, untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan transparansi. Peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan lapangan, termasuk pelatihan juru parkir resmi dan pembentukan tim pengawas dengan SOP yang jelas. Reformulasi regulasi dan tarif retribusi parkir, dengan penyesuaian terhadap potensi dan inflasi daerah. Peninjauan ulang kerja sama dengan pihak ketiga, agar skema bagi hasil dan tanggung jawab lebih adil dan menguntungkan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Oktarina, I. (2010). *No title*. Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi.
- Pemerintah Kabupaten Tegal. (2007). *Peraturan daerah Kabupaten Tegal tentang retribusi parkir di tepi jalan umum*. Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.
- Saputra, Y. G. (2021). *Analisis pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Shelemo, A. A. (2023). *No title*. *Nuclear Physics*, 13(1), 104–116.
- Umum, T. J. (2022). *Pengujian retribusi kendaraan bermotor dan retribusi daerah*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.